

TINDAK PIDANA MENGANGKUT BUTIRAN EMAS TANPA SURAT IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Nama: Billy Sasmita

Jurusan/Program Studi: Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing:

1. Suhariwanto, S.H., M.Hum
2. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Indonesia dalam dunia pertambangan dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah dari sisi sumber daya alam berupa Mineral, batubara, minyak bumi dan sebagainya, semua hasil kekayaan alam tersebut dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pertambangan sudah memiliki hukum positif yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara, undang-undang tersebut telah mengatur dari upaya perizinan usaha pertambangan, wilayah pertambangan, hingga bentuk tindak pidana yang dilarang Hukum Pertambangan.

Fokus penulisan skripsi ini adalah Terdapat Pertambangan tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh penambang tradisional yang tidak memiliki izin pertambang rakyat atau izin usaha pertambangan telah berani melakukan jual-beli hingga mengangkut hasil tambang bukan dari pemilik izin yang resmi atau legal, hal tersebut merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Hukum positif yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 158-165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan disini kebiasaan untuk melakukan jual-beli hasil pertambangan itu tidak sah dan masuk dalam kegiatan pertambangan illegal. Dalam hal seseorang melakukan kegiatan mengangkut emas tanpa izin merupakan bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara

Kata kunci: Izin, Pengangkutan, Pertanggungjawaban Pidana

*THE CRIMINAL ACT CARRIES A GRAIN OF GOLD WITHOUT A PERMIT IN
VIEW OF LAW NUMBER 4 OF 2009 ON MINERAL DAN COAL MINING*

Name: Billy Sasmita

Majors/Programs Of Study: Law/Legal Studies

advisor:

- 1. Suhariwanto, S.H., M. Hum*
- 2. Dr. H. Taufik Iman Santosa, S.H., M. Hum*

ABSTRACT

in the world of mining Indonesia known to have abundant natural wealth of natural resources in the form of minerals, coal, petroleum and so on, all the results of the natural resources controlled by the State and use of-besanya for the prosperity of the people, this is regulated in the provisions of article 33 paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Mining activities already have positive law subject to the provisions of Act No. 4 of the year 2009 About Mineral and coal, the laws have set the licensing effort of the mining business, the mining, to form criminal offence prohibited by Law.

The focus of this thesis writing is There Mining without permission (CRATE) conducted by the traditional miners who did not have the permission of the people's Mining or licences have dared to do business transactions to transport the result mining not from the official permission of the owner or legal, it is a form of criminal offence under positive law that is based on the provisions of article 158-165 of the Act No. 4 of the year 2009 About Mineral and Coal Mining, and here the habit to do the buying and selling of mining results were invalid and illegal mining activities. In the event that someone does a gold haul activities without a license is a criminal offence under Article 161 of the Act No. 4 of the year 2009 About Mineral and coal

Keywords: Permits, transport, Criminal Responsibility